

# **PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SANGATTA**

**Latifah Supeno<sup>1</sup>, Rosa Anggraeiny<sup>2</sup>, Dini Zulfiani<sup>3</sup>**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 9, Nomor 4, 2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Sangatta  
Pengarang : Latifah Supeno  
NIM : 1302015065  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

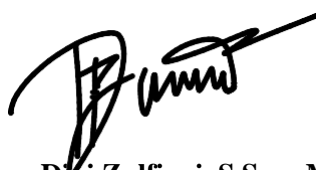
Samarinda, 28 Juni 2021

**Pembimbing I**



**Dra. Rosa Anggraeny, M.Si**  
**NIP. 19571014 198601 2 002**

**Pembimbing II,**



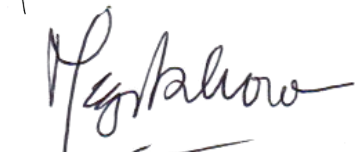
**Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781019 200604 2 003**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	<b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>
<b>Volume</b> : 9	
<b>Nomor</b> : 1	<b><u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u></b>
<b>Tahun</b> : 2021	<b>NIP. 19741120 200501 1 001</b>
<b>Halaman</b> : 5109-5121	

## **PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SANGATTA**

**Latifah Supeno<sup>1</sup>, Rosa Anggraeiny<sup>2</sup>, Dini Zulfiani<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur di Kota Sangatta. Juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam usaha menanggulangi pekerja anak di bawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam proses penanggulangan kerja anak di bawah umur oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer didapat dari key informan yaitu Kepala Bagian Pelayanan Anak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang dipilih melalui purposive sampling, dan informan yaitu pekerja anak di bawah umur dengan menggunakan teknik snowball sampling. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, panduan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan trigulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (display data), dan pengambilan kesimpulan (conclusion drawing). Kesimpulan berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanggulangan pekerja anak di bawah umur masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya: pertama, tidak transparan dan kooperatifnya pihak pengusaha. Kedua, kurangnya kesadaran anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Ketiga, peran aktif dari masyarakat yang sangat diperlukan, namun masyarakat masih bersikap acuh dan masa bodoh terkait persoalan pekerja anak di bawah umur.*

***Kata Kunci : Pekerja Anak, Penanggulangan Pekerja Anak, Pekerja Anak di Bawah Umur.***

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: najwalatifah744@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Pekerja anak merupakan masalah yang penting di Indonesia karena semakin tahun jumlahnya semakin bertambah kebanyakan mereka bekerja di sektor pertanian yang lainnya seperti tukang parkir, tukang semir, tukang kebun sawit dan sebagainya. Jika dilihat dari sektor formal, pekerjaan anak-anak cenderung ada di garis batas antara ekonomi formal dan informal seperti bersama-sama dengan orangtua mereka di industri rumah tangga dan di perkebunan. Sementara itu, pekerja anak menjadi suatu fenomena yang menyedihkan yang terjadi di tengah kondisi kemiskinan kita.

Meskipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak tetapi jika tidak ada pengusaha yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak muncul demikian pula sebaliknya apabila pemerintah terhadap pekerja anak tinggi tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak muncul dalam kenyataan anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak, anak yang bekerja adalah bentuk penelantaran hak-hak anak tumbuh dan berkembang secara wajar karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka, Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain.

Dalam masalah anak yang bekerja ini bukan berarti anak tidak bekerja sama sekali, Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orangtua di samping tugas sebagai pelajar. Anak yang bekerja batasannya adalah anak jangan sampai mengalami eksploitasi di sini adalah seorang anak di minta melakukan pekerjaan dan dijanjikan mendapat upah secara ekonomi pada anak.

Penanggulangan pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sangatta belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi dari pejabat kelurahan ataupun pejabat kecamatan untuk mendata anak-anak yang bekerja di bawah umur menyebabkan tidak adanya informasi yang masuk kepada Dinas Sosial Kota Sangatta dan kurangnya dana untuk melakukan survei dan memberi kepada pekerja anak-anak di bawah umur yang membutuhkan dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur di Kota Sangatta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Dinas Sosial dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur di Kota Sangatta?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Organisasi***

Organisasi menurut Siagian (2008 : 6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Manullang (2009 : 59) perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani "*organon*" dan istilah Latin "*organum*" yang berarti alat bagian anggota atau badan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

### ***Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur***

Penanggulangan pekerja anak di bawah umur adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi pekerja anak di bawah umur keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku anak yang telah dinyatakan bekerja dengan kata lain upaya penanggulangan pekerja anak di bawah umur dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari pemerintah daerah terkait dengan adanya otonomi daerah.

Program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan

---

secara konsepsional tidak diperlukan tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak yakni Penghapusan (*abolition*), Perlindungan (*ptotection*), dan Penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*) (Affandi, 2007 : 17)

### ***Faktor-faktor Pekerja Anak di Bawah Umur***

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak di bawah umur beberapa diantaranya adalah: faktor ekonomi, faktor migrasi, faktor budaya, faktor kurangnya anak pencatatan kelahiran. Dalam hal ini upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur secara umum yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan perlu dilindungi dan menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### ***Definisi Konsepsional***

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Peranan Dinas Sosial dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur adalah melakukan *monitoring* dan evaluasi serta mengadakan pembinaan dalam bidang pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

### ***Metode Penelitian***

Metode penelitian ini untuk mengetahui tentang peranan Dinas Sosial sangatta maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana tidak memerlukan pengujian hipotesis dan hanya mencari informan sebanyak-banyaknya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur untuk mencerdaskan anak bangsa yaitu :
  - a. Fokus untuk mencegah pekerja anak secara prefentif
  - b. Untuk melihat tindakan Dinas Sosial secara refresif
2. Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Sangatta dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini pemilihan informan didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun yang menjadi *key* informan ialah Kepala Bagian Pelayanan Sosial Anak Dalam penelitian ini memiliki *key* informan dilakukan melalui teknik *purposive*

*sampling*.

Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan menggunakan informan dan dari kegiatan hasil observasi. Serta diperoleh dari kegiatan dokumentasi berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang ada di Kantor Dinas Sosial.

Untuk mendapatkan data tersebut maka diperlukan adanya metode tertentu dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field work research*). Pada penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dimana ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang di sebut analisis.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur di Kabupaten Kutai Timur***

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah pekerja anak yang mana harus mendapat perhatian yang sifatnya terpadu dan serius. Dewasa ini permasalahan terkait pekerja anak di bawah umur makin kompleks saja yang muncul akibat keterlantaran dan kemiskinan di perkotaan.

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak belum efektif sebagaimana telah diketahui bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah ekonomi hukum anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum anak yang bekerja dapat membantu masalah kekurangan ekonomi dalam keluarga.

Adapun pekerja anak didefinisikan sebagai anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu aktifitas pendidikan membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak disebut pekerja anak jika memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Anak bekerja setiap hari
2. Anak tereksploitasi
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang
4. Waktu sekolah terganggu atau bahkan tidak sekolah

Penulis memperoleh data mengenai jumlah pekerja anak di bawah umur di Kota Sangatta tahun 2018 – 2020. Berdasarkan data tahun 2018 tersebut maka dapat diketahui pekerja anak di bawah umur yang berada di Kota Sangatta berjumlah 25 orang, lalu tahun 2019 mengalami penurunan yakni 19 orang. Adapun data terakhir pada tahun 2020 jumlah pekerja anak di bawah umur mengalami penurunan tercatat ada 15 orang, walaupun diketahui bahwa jumlah pekerja anak tahun 2020 ini menurun dibandingkan tahun 2018.

Dari data tersebut juga diketahui bahwa semua dari pekerja anak di bawah umur merupakan anak yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan juga anak terlantar alasan kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu orangtuanya menghasilkan uang. Sementara itu, anak yang bekerja di pabrik disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja dan kemauan anak untuk dibayar dengan harga murah. Hal tersebut menjadi keadaan yang sangat awam bagi anak untuk mengalami eksploitasi.

Fenomena terjadinya pekerja anak juga tidak terlepas dari nilai upah anak terhadap keuangan keluarga semakin tinggi upah pekerja anak, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan anak terjun dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan pekerja anak yang memiliki upah tinggi, maka kontribusi dalam pendapatan rumah tangga akan semakin tinggi. Maka dari itu pekerja anak akan diarahkan untuk bekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, semakin tinggi upah pekerja anak akan semakin menarik untuk rumah tangga melepaskan anak-anak mereka untuk menjadi pekerja anak.

Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. *Monitoring* dan evaluasi merupakan usaha dasar yang diusahakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menanggulangi persoalan pekerja anak di bawah umur. Selain itu, sebagai pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penanggulangan pekerja anak di bawah umur, Dinas Sosial juga memberikan pembinaan dalam bidang pendidikan kepada pekerja anak di bawah umur yang memang bersedia untuk dibimbing dan dibina di dalam panti.

### ***Monitoring atau Evaluasi***

*Monitoring* menjadi salah satu bentuk tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk membina para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk pekerja anak di bawah umur. *Monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang



diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Lalu evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pelayanan Anak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur juga dengan salah satu pekerja anak dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang diusahakan oleh pemerintah masih belum berjalan dengan baik dan optimal dapat diinterpretasikan bahwa masih banyak celah di dalam proses pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur juga dengan instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan di Kabupaten.

*Monitoring* adalah hal penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya, pengawasan adalah salah satu Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan tindakan tersebut diperlukan hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Dengan kata lain, pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin pelaksana pemantauan untuk sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah masing-masing Pengelola Kegiatan Satker di daerah serta komponen pembina/penanggungjawab kegiatan pusat yang hasilnya menjadi *input* bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat diketahui bahwa penyelenggara *monitoring* dalam proses penanggulangan pekerja anak di bawah umur itu dilakukan dengan cara Pengawasan Fungsional. Hal ini sesuai dengan Keputusan MenpanRB RI Nomor 63 Tahun 2004 dimana pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta yang terdapat di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan cara melakukan pendataan di pekerjaan formal seperti perkebunan sawit. Jadi perusahaan diharuskan setiap tiga bulan sekali untuk melaporkan komposisi pekerja mereka kepada Kementerian Ketenagakerjaan juga Dinas Sosial setempat, setelah itu pihak terkait akan melakukan kroscek terhadap data yang telah diberikan perusahaan. Namun sayang di dalam proses pengawasan ini pula terdapat celah sehingga menjadikannya kurang optimal dan kurang efektif. Terkadang perusahaan melakukan tindakan tidak transparan terkait keadaan sebenarnya terkait data karyawan mereka.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur belum maksimal karena kurang kooperatifnya perusahaan dalam mengirimkan data terkait komposisi karyawannya juga keterbatasan Dinas Sosial juga pihak terkait untuk mengkroscek data tersebut.

Sedangkan menurut OECD (dalam <https://grhasia/jogjaprov.go.id>) definisi evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan kebijakan atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang subyektif dan sistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu kegiatan program kebijakan organisasi sektor tematik dan bantuan negara dan lain-lainnya. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Menurut Mustopadidjaja (dalam Syahrani, 2015:138) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement* tertentu). Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pengawasan pekerja anak menghasilkan data bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur untuk dapat lebih lanjut mengusahakan proses penanganan terhadap masalah pekerja anak di bawah umur.

Hasil evaluasi memperlihatkan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur kurang optimal dalam rangka penanganan pekerja anak di bawah umur, hal ini terlihat dari sangat sedikit sekali pekerja anak yang mau dan mampu untuk dibina dari beberapa pekerja anak yang terdata hanya ada dua orang yang berhasil dibina di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan yang berada di Kota Samarinda.

### ***Pembinaan dalam Bidang Pendidikan***

Penulis telah melakukan wawancara bersama Ibu Hari Suprihatin selaku Kepala Bagian Pelayanan Anak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur mengenai pembinaan dalam bidang pendidikan terhadap pekerja anak di bawah umur yang dapat disimpulkan pembinaan dalam bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik melalui peranan Panti Sosial yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan operasional di dalam panti baik pendidikan sektor formal maupun informal dipastikan berjalan dengan baik.

Menurut Dewantara (dalam Mulyasana, 2015 : 5) pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak dimaksudkan dengan untuk mencetak karakter dan kemampuan peserta didik sama seperti gurunya.

Dalam pengertian dasar pendidikan adalah proses menjadi yakni menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat watak kemampuan dan hati nuraninya secara utuh. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua potensi peserta didik secara manusiawi agar mereka menjadi diri sendiri yang mempunyai kemampuan dan kepribadian yang unggul.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal merupakan suatu jalur pendidikan yang dilakukan di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal biasanya dilakukan untuk mereka yang merasa membutuhkan pendidikan tambahan, sebagai pengganti ataupun pelengkap dari pendidikan formal yang diikuti.

Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, pekerja anak di bawah umur yang putus sekolah dan berasal dari keluarga ekonomi lemah, akan dibantu untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah formal melalui Panti Sosial Asuhan Anak Harapan, selaku pihak penyelenggara kegiatan operasional Dinas Sosial menjamin keberlanjutan bagi anak jalanan yang juga menjadi anak asuhnya Segala kebutuhan sekolah beserta sugu akan dipenuhi oleh pihak Panti Sosial. Berdasarkan data yang diperoleh pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan terdapat tujuh orang anak asuh yang duduk di bangku SD, 12 orang di bangku SMP/ MTs, dan 34 orang sedang mengenyam bangku SMA / SMK. Selain memfasilitasi anak asuh dengan pendidikan formal, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan juga mengadakan pendidikan non formal di dalam Panti dua di antara mereka adalah berasal dari Kabupaten

Kutai Timur.

***Faktor Penghambat Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur***

Di dalam pelaksanaan proses penanggulangan terhadap pekerja anak di bawah umur tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur menghadapi beberapa faktor yang menjadi penghambat. Beberapa hal menjadi faktor yang menghambat usaha penanggulangan pekerja anak di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur diantaranya rendahnya kesadaran dari pengusaha, orangtua dan juga anak. Serta sebagian masyarakat yang terkesan pasif dan acuh tak acuh akan keberadaan pekerja anak di bawah umur.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan pasal sub-sub sebelumnya maka dapat peneliti pahami bahwa yang menjadi faktor penghambat bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang tidak kooperatif dan kurang transparan.  
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial telah meminta para pengusaha tidak lagi mempekerjakan pekerja anak di perusahaannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak. Serikat pekerja bisa aktif melaporkan keberadaan pekerja anak di perusahaannya. Bila ditemukan perusahaan yang memaksakan anak untuk bekerja, pemerintah tidak segan-segan melakukan pencabutan ijin kerja dan penindakan hukum secara pidana. Pasalnya, dalam Undang-undang Perlindungan Anak, secara tegas melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Apalagi, masih banyak perusahaan yang masih memperkerjakan pekerja anak di bawah umur. Padahal setiap tiga bulan sekali pemerintah melalui instansi terkait meminta perusahaan untuk melaporkan data komposisi pekerja yang ada di perusahaannya. Karena masih banyaknya perusahaan bandel sehingga memanipulasi data yang dikirim, Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur pun merasa kecolongan.
2. Kurangnya kesadaran orangtua dan anak akan pentingnya pendidikan.  
Dapat diketahui bahwasanya mayoritas atau bahkan hampir semua adalah anak yang berasal dari keluarga miskin atau ekonomi lemah. Kemiskinan dijadikan alasan bagi orangtua untuk membenarkan tindakan anak untuk membiarkan anak mereka bekerja di usia sekolah. Himpitan ekonomi menjadikan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, hingga ada orangtua yang memaksa anaknya untuk bekerja guna meringankan beban keluarga.
3. Partisipasi masyarakat yang kurang.  
Masyarakat juga merupakan salah satu penghambat dalam proses

penanggulangan pekerja anak di bawah umur yang diusahakan oleh Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur. Padahal Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berharap adil secara aktif masyarakat terhadap pekerja anak di bawah umur.

Masyarakat kerap diam dan cenderung bersikap masa bodoh jika mendapati ada perusahaan yang masih memperkerjakan anak di bawah umur, atau bahkan anak yang bekerja di jalan. Masyarakat seperti tidak mau ikut campur terhadap kehidupan masyarakat yang lain. Padahal mereka mengetahui bahwa menurut hukum, mempekerjakan anak di bawah umur merupakan suatu pelanggaran hukum.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yaitu melakukan *monitoring* atau pengawasan, juga mengevaluasi hasil dari pengawasan yang dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi pasti di lapangan terkait pekerja anak di bawah umur sehingga setelahnya dapat dilakukan proses penanggulangan.
2. Dari hasil penelitian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur belum maksimal. Terlihat dari masih ada perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur, padahal mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan melanggar hukum. Karena sanksi yang tidak tegas menjadikan usaha yang selama ini dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
3. Pembinaan dalam bidang pendidikan sudah berjalan baik. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan selaku pelaksana kegiatan teknis dan operasional, juga sebagai rujukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sudah memastikan dan menjamin keberlangsungan pendidikan bagi semua anak asuhnya. Hingga sampai saat ini terdapat dua mantan pekerja anak asal Kutai Timur yang menjadi anak binaan di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.
4. Faktor penghambat dalam usaha penanggulangan pekerja anak di bawah umur oleh Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur ialah kurang aktifnya pengusaha dalam ikut menegakkan peraturan terkait larangan memperkerjakan anak di bawah umur, kurangnya kesadaran orangtua dan anak tentang pentingnya pendidikan, juga masih apatisnya masyarakat sekitar terkait persoalan ini.

## Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah peneliti sebutkan di atas, maka berikut ini saran yang dapat peneliti berikan:

1. Dari segi pengawasan, diharapkan pemerintah dapat lebih secara aktif memeriksa kembali data terkait komposisi karyawan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Hendaknya pemerintah mengkroscek kembali data yang dikirimkan, sehingga pemerintah melalui dinas terkait lebih dapat mengetahui keadaan sebenarnya.
2. Hendaknya Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur bersama instansi terkait lainnya rutin mengadakan sosialisasi dengan memanfaatkan momentum hari internasional menentang pekerja anak (*world day against child labour*) yang diperingati setiap 12 Juni untuk menyebarkan semangat menghapus pekerja anak.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dapat kembali menghidupkan Panti Sosial di Kabupaten Kutai Timur, sehingga tidak perlu mengirim anak binaan ke Panti Sosial yang jauh di Kota Samarinda. Hal ini turut membuat enggan orangtua para pekerja anak yang tidak mau ditinggal jauh oleh anak mereka.

## Daftar Pustaka

- Affandi, Idrus. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religius)*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- <https://grhasia.jogjaprovo.go.id/berita/78/monitoring-dan-evaluasi-programkegiatan-skpd>. 2018. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD. Diakses pada 5 Agustus 2018.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, Dedy. 2015. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi

Peran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam Penanggulangan Pekerja  
Anak di Bawah Umur (Supeno, Anggraeiny, Zulfiani)

---

Aksara.

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.